

Gambaran Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Kader di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Description of National Health Insurance Membership in Cadres Mumbulsari Jember District

Ricko Pratama Ridzkyanto¹

*Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat,
FKM Universitas Jember¹
e-mail : ricko.fkm@unej.ac.id*

ABSTRACT

The National Health Insurance Program is a form of National Social Security where the program's membership consists of two groups, namely participants who are recipients of contribution assistance and participants who are not recipients of contribution assistance. The highest coverage of Population Health Insurance in Jember Regency in 2018 was Recipients of the State Budget Contribution Assistance (PBI) at 44.40%. The purpose of the study was to determine the participation of BPJS Health in posyandu cadres in Mumbulsari District, Jember Regency. This type of research is quantitative research with a cross-sectional research design carried out in Mumbulsari District, Jember Regency in December 2018 with a sample of 198 posyandu cadres taken by cluster sampling. The results showed that BPJS Health participation was 53.5% PBI APBD, 17.2% PBI APBN, 16.2% not yet owned, 8.1% self-employed, and 5.1% private worker. Further research is needed to examine the factors that influence National Health Insurance membership in cadres.

Keywords: National Health Insurance, Cadre, Membership

ABSTRAK

Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu wujud dari Jaminan Sosial Nasional dimana kepesertaan program tersebut terdiri atas dua kelompok yaitu peserta penerima bantuan iuran dan peserta bukan penerima bantuan iuran. Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk di Kabupaten Jember pada tahun 2018 tertinggi adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN sebesar 44,40%. Tujuan penelitian untuk mengetahui kepesertaan BPJS Kesehatan pada kader posyandu di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional dilaksanakan di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember pada bulan Desember 2018 dengan sampel 198 kader posyandu yang diambil dengan cara cluster sampling. Hasil penelitian menunjukkan kepesertaan BPJS Kesehatan yaitu PBI APBD sebesar 53,5%, PBI APBN sebesar 17,2%, belum memiliki sebesar 16,2%, pekerja mandiri sebesar 8,1%, dan pekerja swasta sebesar 5,1%. Diperlukan penelitian lanjut mengkaji faktor yang mempengaruhi kepesertaan BPJS Kesehatan pada kader.

Kata kunci: BPJS Kesehatan, Kader, Kepesertaan

PENDAHULUAN

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu wujud dari Jaminan Sosial Nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Di dalam Undang-Undang SJSN mengamanatkan bahwa seluruh penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan termasuk WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari enam bulan. Peserta merupakan setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar pemerintah. Peserta Program JKN terdiri atas 2 kelompok yaitu : Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan peserta bukan penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan. Peserta PBI Jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu, sedangkan Peserta Bukan PBI adalah Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya, serta bukan pekerja dan anggota keluarganya.

Pada akhir tahun 2018, diperoleh data status kepemilikan masyarakat Jawa Timur dalam Program JKN dari Penerima Bantuan Iuran APBN (PBIN) sebanyak 15.706.648 jiwa (39%), PBID 2.153.641 jiwa (5%), Pekerja Penerima Upah (PPU) 5.036.598 jiwa (12%), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 3.650.660 jiwa (9%) dan sebanyak 13.572.680 jiwa (33%) belum menjadi peserta JKN. Yang dimaksud dengan Pekerja Penerima Upah (PPU) meliputi PNS, TNI/POLRI dan Pekerja di sektor formal baik BUMN/BUMD maupun swasta, sedangkan peserta mandiri dimasukkan ke dalam kategori PBPU. Sesuai dengan peta jalan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dimana minimal 95% total penduduk pada tahun 2019 telah menjadi peserta JKN, Pada tahun 2018 capaian sebesar 66,88% dan ada 2 kota yang sudah UHC yaitu kota madiun (95,69%) dan Kota Mojokerto (95,25%). (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2018)

Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Jember tahun 2018, cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk di Kabupaten Jember pada tahun 2018 adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN sebesar 44,40%, PBI APBD sebesar 7,95%, Pekerja penerima upah (PPU) sebesar 59,49%, Pekerja bukan penerima upah (PBPU) / mandiri sebesar 7,47%, dan Bukan pekerja (BP) sebesar 1,72%. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang dapat disebut juga sebagai Kader adalah setiap orang yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui kepesertaan BPJS Kesehatan pada kader posyandu di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

METODE

Jenis penelitian termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan desain penelitian *cross sectional*. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Mumbusari Kabupaten Jember pada bulan Desember 2018. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian kader posyandu di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dengan teknik pengambilan sampel yaitu cluster sampling sehingga didapat 198 kader dari 390 total kader yang ada. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang berisi tentang kepesertaan BPJS Kesehatan yang kemudian dianalisis menggunakan tabel distribusi frekuensi.

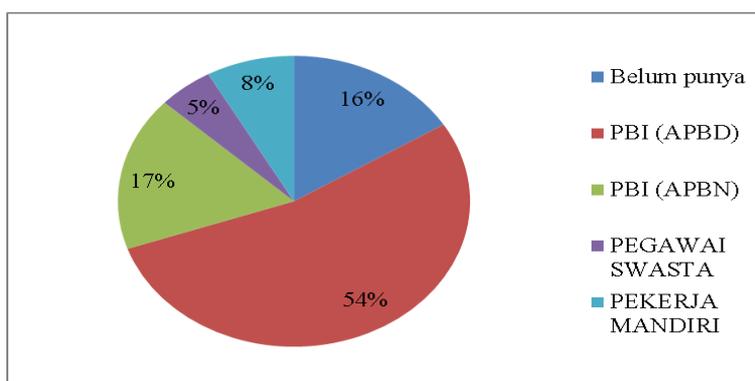
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepesertaan BPJS Kesehatan pada Kader Posyandu di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Tabel 1. Kepesertaan BPJS Kesehatan Pada Kader Posyandu Di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Kepesertaan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Belum punya	32	16,2
PBI (APBD)	106	53,5
PBI (APBN)	34	17,2
PEGAWAI SWASTA	10	5,1
PEKERJA MANDIRI	16	8,1
Total	198	100,0

Sumber : Data Primer Terolah (2018)



Gambar 1. Kepesertaan BPJS Kesehatan Pada Kader Posyandu Di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kepesertaan BPJS Kesehatan Pada Kader Posyandu Di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember pada tahun 2018 yaitu PBI APBD sebesar 53,5%, PBI APBN sebesar 17,2%, belum memiliki sebesar 16,2%, pekerja mandiri sebesar 8,1%, dan pekerja swasta sebesar 5,1%. Berikut ditampilkan tabulasi silang antara Kepesertaan BPJS Kesehatan dengan desa di wilayah kerja puskesmas mumbulsari sebagai berikut :

Tabel 2. Tabulasi Silang Tabulasi Silang Antara Kepesertaan BPJS Kesehatan dengan Desa di Wilayah Kerja Puskesmas Mumbulsari

Desa	Kepesertaan		Belum punya		PBI (APBD)		PBI (APBN)		PEGAWAI SWASTA		PEKERJA MANDIRI		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Karang Kedawung	1	3,33	21	70	4	13,33	0	0	4	13,33	30	100		
Kawangrejo	2	10,00	12	60,00	1	5,00	3	15,00	2	10,00	20	100		
Lampeji	11	31,43	6	17,14	13	37,14	2	5,71	3	8,57	35	100		
Lengkong	2	9,52	9	42,86	2	9,52	4	19,05	4	19,05	21	100		
Mumbulsari	5	13,16	21	55,26	9	23,68	0	0,00	3	7,89	38	100		
Suco	9	27,27	19	57,58	4	12,12	1	3,03	0	0,00	33	100		
Tamansari	2	9,52	18	85,71	1	4,76	0	0,00	0	0,00	21	100		
Total	32	104,24	106	388,55	34	105,57	10	42,792	16	58,847	198	700		

Sumber : Data Primer Terolah (2018)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk Desa Karang Kedawung kepesertaan tertinggi pada kelompok PBI APBD yaitu sebesar 70%, Desa Kawangrejo kepesertaan tertinggi pada kelompok PBI APBD yaitu sebesar 60%, Desa Lampeji kepesertaan tertinggi pada kelompok PBI APBN yaitu sebesar 37,14%, Desa Lengkong kepesertaan tertinggi pada kelompok pegawai swasta yaitu sebesar 19,05% dan pekerja mandiri yaitu sebesar 19,05%, Desa Mumbulsari kepesertaan tertinggi pada kelompok PBI APBD yaitu sebesar 55,26%, Desa Suco kepesertaan tertinggi pada kelompok PBI APBD yaitu sebesar 57,58%, dan Desa Tamansari kepesertaan tertinggi pada kelompok PBI APBD yaitu sebesar 85,71%

Kepesertaan BPJS Kesehatan pada Kader Posyandu di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Kepesertaan BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI). Peserta PBI Jaminan Kesehatan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI Jaminan Kesehatan) adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan

Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan terdiri atas PPU dan anggota keluarganya, PBPU dan anggota keluarganya, dan BP dan anggota keluarganya. PPU terdiri atas Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, Anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, pegawai swasta. PBPU terdiri atas Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri. BP terdiri atas investor, Pemberi Kerja, penerima pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018). Hasil penelitian sejalan dengan peraturan tersebut dikarenakan kepesertaan kader di Kecamatan Mumbulsari terdiri dari PBI APBD, PBI APBN, pekerja mandiri, dan pekerja swasta.

Penelitian yang dilakukan oleh Putro (2017) dengan responden nelayan diperoleh bahwa untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan mutu layanan baik dari pendaftaran maupun layanan di Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PPK 1) maupun Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan (PPK 2), diberikan kemudahan dalam prosedur pendaftaran dalam hal persyaratan, lokasi atau tempat pendaftaran di kantor BPJS yang mudah dijangkau dan mendapatkan kartu anggota BPJS dengan segera, serta memberikan kemudahan dalam membayar premi atau iuran. Teori tersebut diharapkan dapat diterapkan pada Kader Posyandu Di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dikarenakan masih ada ader yang belum memiliki BPJS Kesehatan sebesar 16,2%.

Menurut Wirsardjono (1998) sektor informal sebagai sektor kegiatan ekonomi kecil-kecilan mempunyai ciri tidak teratur dalam pola kegiatan baik dari segi waktu, pemodal, dan penerimaan atau pendapatan. Menurut Pangestika (2017), kepesertaan BPJS Kesehatan sector informal (wiraswast/pedagang) di Kelurahan Poncol dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mempunyai pengeluaran kurang dari pendapatannya kemungkinan besar akan bersedia mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri, karena mereka

akan mempunyai sisa pendapatan untuk digunakan membayar premi setiap bulan. Masyarakat yang mempunyai pengeluaran lebih besar dari pendapatan, mereka cenderung tidak mengikuti BPJS Kesehatan mandiri karena tidak mempunyai sisa pendapatan. Masyarakat akan mengikuti BPJS Kesehatan apabila pengeluaran akan kebutuhan pokok terpenuhi. Hasil penelitian sejalan dengan kedua teori tersebut dimana untuk Desa Lengkong kepesertaan tertinggi pada kelompok pegawai swasta yaitu sebesar 19,05% dan pekerja mandiri yaitu sebesar 19,05%

KESIMPULAN

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa di Kepesertaan BPJS Kesehatan Pada Kader Posyandu Di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember pada tahun 2018 yaitu PBI APBD sebesar 53,5%, PBI APBN sebesar 17,2%, belum memiliki sebesar 16,2%, pekerja mandiri sebesar 8,1%, dan pekerja swasta sebesar 5,1%. Berdasarkan wilayah kerja di Puskesmas Mumbulsari untuk Desa Karang Kedawung kepesertaan tertinggi pada kelompok PBI APBD yaitu sebesar 70%, Desa Kawangrejo kepesertaan tertinggi pada kelompok PBI APBD yaitu sebesar 60%, Desa Lampeji kepesertaan tertinggi pada kelompok PBI APBN yaitu sebesar 37,14%, Desa Lengkong kepesertaan tertinggi pada kelompok pegawai swasta yaitu sebesar 19,05% dan pekerja mandiri yaitu sebesar 19,05%, Desa Mumbulsari kepesertaan tertinggi pada kelompok PBI APBD yaitu sebesar 55,26%, Desa Suco kepesertaan tertinggi pada kelompok PBI APBD yaitu sebesar 57,58%, dan Desa Tamansari kepesertaan tertinggi pada kelompok PBI APBD yaitu sebesar 85,71%

SARAN

Diperlukan ketersediaan sarana prasarana berupa fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dapat berupa Dokter Praktek Mandiri, Dokter Gigi Swasta, Klinik Pratama dalam jumlah yang cukup dan merata sehingga akses peserta dalam hal ini penduduk terhadap faskes lebih mudah dan terjangkau serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang sudah ada dengan melihat ketersediaan tenaga medis dan paramedis serta tenaga penunjang kesehatan yang lainnya harus dapat memenuhi standar yang telah ditentukan. Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga diperlukan penelitian lanjut terkait faktor yang mempengaruhi kepesertaan BPJS Kesehatan pada kader sehingga mendapatkan pemecahan terkait kader yang belum tergabung dalam BPJS Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 2018. *Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018*. Surabaya : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. 2018. *Profil Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2018*. Jember : Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Putro, G., & Barida, I. 2017. *Manajemen peningkatan kepesertaan dalam jaminan kesehatan nasional pada kelompok nelayan non penerima bantuan iuran (Non PBI)*. Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 27(1), 17-24.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Pangestika, V. F., Jati, S. P., & Sriatmi, A. (2017). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepesertaan Sektor Informal dalam Bpjs Kesehatan Mandiri di Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan*. Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip), 5(3), 39-48.

Wirosardjono. S. 1998. *Pertumbuhan Penduduk Indonesia Catatan Analisa Nomor 3*